

Analisis Dampak Korupsi Pada Proyek Jalan Tol MBZ Dan Padang – Sicincin

Suse Lamtiar Simbolon *¹

Risqi Wahyu Jati Utama ²

Ferri Amsar Tauna ³

Hanafie Adhie Prakoso ⁴

Risfando Florendra Adefertana ⁵

^{1,2,3,4,5} Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

*e-mail: suse.lamtiar@ppicurug.ac.id¹, risqiwahyu.jatiutama@ppicurug.ac.id²

Abstrak

Jalan tol memiliki peran penting dalam memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun, pembangunan dan operasional jalan tol juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak buruk yang ditimbulkan oleh jalan tol MBZ dan Padang-Sicincin, khususnya dari aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan kondisi fisik jalan. Metode yang digunakan adalah studi literatur serta analisis data sekunder terkait kecelakaan lalu lintas, perubahan tata guna lahan, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek ini menyebabkan konflik sosial akibat pembebasan lahan, peningkatan polusi udara dan suara, serta kerusakan lingkungan. Selain itu, ditemukan bahwa korupsi dalam pembangunan mengakibatkan penurunan kualitas material jalan, yang mempercepat kerusakan dan meningkatkan biaya perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur tol di Indonesia.

Kata kunci: korupsi, jalan tol, dampak

Abstract

Toll roads play a crucial role in facilitating traffic flow and enhancing interregional connectivity. However, their construction and operation can also lead to various negative impacts. This study aims to analyze the adverse effects of the MBZ and Padang-Sicincin toll roads, particularly in terms of social, environmental, economic, and physical road conditions. The research method employed includes a literature review and secondary data analysis related to traffic accidents, land-use changes, and social impacts on surrounding communities. The findings indicate that these projects have caused social conflicts due to land acquisition, increased air and noise pollution, and environmental degradation. Furthermore, corruption in construction has led to a decline in material quality, accelerating road damage and increasing maintenance costs. Therefore, stricter oversight and improved policies are needed for toll road infrastructure development in Indonesia.

Keywords: Toll Roads, Infrastructure Corruption, Social Impact

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sehingga dapat merugikan banyak pihak. Menurut *Transparency International* ("Transparency International," 2023), korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang dapat merusak sistem pemerintahan dan ekonomi suatu negara. Korupsi juga menjadi salah satu permasalahan yang berpengaruh dalam berbagai sektor di Indonesia, pembangunan infrastruktur misalnya. Salah satu penanda dari meningkatnya kasus korupsi di sektor pembangunan infrastruktur adalah merosotnya citra sosial industri di negara berkembang seperti Indonesia (ariani et al., 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam proyek pembangunan tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya sistem pengawasan, adanya pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik korupsi, dan proses lelang proyek yang tidak transparan. Sering kali, proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas justru lebih menguntungkan beberapa pihak saja, seperti kontraktor dan pejabat yang terlibat dalam korupsi untuk mengurangi kualitas proyek demi keuntungan pribadi (Salsabila & Ramdhani, 2024).

Praktik korupsi yang ada di Indonesia, khususnya dalam proyek infrastruktur dapat ditemukan dalam berbagai pembangunan jalan tol, seperti jalan tol MBZ dan Padang-Sicincin. Permasalahan utama yang muncul dalam proyek-proyek tersebut berkaitan dengan penurunan kualitas konstruksi, yang disebabkan oleh penyimpangan dari spesifikasi bahan dan standar teknis yang seharusnya dipenuhi. Pengurangan kualitas ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Jalan Tol MBZ (Mohammed Bin Zayed), yang menghubungkan Jakarta dan Cikampek, serta Jalan Tol Padang-Sicincin yang merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera memiliki peran krusial dalam meningkatkan konektivitas serta memperlancar arus transportasi di Indonesia. Di sisi lain, dugaan korupsi terhadap pembangunan infrastruktur jalan Tol tersebut mengakibatkan berbagai isu, seperti kerusakan jalan yang berulang, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, serta dampak lingkungan yang menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara sistematis dampak negatif dari kedua jalan tol tersebut guna mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi untuk meningkatkan infrastruktur.

Berbagai permasalahan kerap muncul dalam pembangunan jalan tol, termasuk pada proyek MBZ dan Padang-Sicincin, seperti proses pembebasan lahan yang kurang transparan, menurunnya kualitas jalan akibat penggunaan material yang tidak sesuai standar, serta meningkatnya kecelakaan akibat desain infrastruktur yang kurang optimal. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa sejumlah proyek jalan tol mengalami kerusakan dalam waktu singkat setelah diresmikan, sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar.

Di sisi lain, pembangunan jalan tol juga menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Hilangnya kawasan hutan, perubahan tata guna lahan, serta meningkatnya polusi udara akibat tingginya volume kendaraan yang melintas menjadi beberapa permasalahan utama. Selain itu, proyek jalan tol sering kali mengganggu keseimbangan ekosistem dan berpotensi menyebabkan banjir akibat perubahan sistem drainase di wilayah yang dilalui.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi dampak buruk dari kedua jalan tol tersebut dengan pendekatan yang sistematis. Dengan memahami berbagai aspek negatif yang ditimbulkan oleh proyek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam pengelolaan infrastruktur jalan tol di masa depan, terutama dalam mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahap pembangunan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel media, dan dokumen terkait lainnya yang membahas tentang dampak korupsi pada proyek infrastruktur, khususnya proyek jalan tol MBZ dan Padang – Sicincin. Sumber-sumber tersebut akan dijadikan dasar untuk mengidentifikasi pola-pola umum terkait korupsi dalam proyek-proyek serupa, serta menganalisis bagaimana praktik korupsi dapat mempengaruhi kualitas dan kelancaran pembangunan jalan tol tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan teori-teori terkait pengelolaan proyek dan kebijakan publik yang dapat memberikan perspektif dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan oleh korupsi.

Pendekatan kualitatif studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyaring dan mengevaluasi informasi yang telah ada serta membandingkan berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh korupsi pada sektor infrastruktur. Peneliti akan menggunakan teknik analisis konten untuk menilai relevansi dan kontribusi sumber-sumber literatur dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efek korupsi terhadap efisiensi anggaran, keterlambatan proyek, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, khususnya dalam konteks pembangunan jalan tol MBZ dan Padang – Sicincin.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dampak yang paling signifikan. Data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan standar infrastruktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menilai tingkat penyimpangan yang terjadi akibat praktik korupsi dalam pembangunan jalan tol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol MBZ dan Padang-Sicincin sangat signifikan, terutama bagi masyarakat sekitar proyek. Pada kasus Jalan Tol Padang-Sicincin, proyek ini menimbulkan konflik sosial akibat ketidaksepakatan dalam pembebasan lahan, yang menyebabkan lebih dari 200 keluarga terdampak kehilangan mata pencaharian karena sawah dan ladang mereka tergusur. Selain itu, terjadi lonjakan harga tanah yang tidak terkendali, mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat setempat untuk membeli kembali lahan mereka yang telah berubah fungsi menjadi kawasan industri atau komersial, sehingga rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, hukum dan lain lain (Society et al., 2017). Tak hanya itu, dalam pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin muncul ketegangan akibat adanya masyarakat yang tidak tahu dan merasa tidak diundang dalam konsultasi publik (Sapitri, 2021). Kehilangan ruang interaksi sosial akibat pemisahan desa oleh konstruksi jalan tol juga menjadi isu serius yang menghambat hubungan sosial dan budaya setempat.

Lebih jauh lagi, pembangunan jalan tol ini menyebabkan fragmentasi sosial dengan memisahkan desa-desa yang sebelumnya saling terhubung (Aulia, 2025). Kehilangan ruang interaksi sosial ini mengganggu hubungan antarwarga dan mengurangi rasa kebersamaan dalam komunitas. Perubahan tata ruang akibat konstruksi jalan tol juga dapat mengakibatkan isolasi bagi beberapa pemukiman, di mana warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai pusat kegiatan ekonomi atau sosial. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat mengurangi solidaritas komunitas dan memperburuk kondisi mental masyarakat yang merasa terasing dari lingkungan mereka (Lamijan & Tohari, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dampak sosial ini dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur besar seperti jalan tol.

Selain itu, dampak sosial dari pembangunan jalan tol MBZ dan Padang-Sicincin juga mencakup perubahan dalam pola migrasi dan demografi masyarakat. Dengan adanya akses yang lebih baik melalui jalan tol, terdapat potensi peningkatan arus migrasi penduduk dari daerah lain yang mencari peluang kerja di kawasan industri baru yang terbentuk. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya urbanisasi yang cepat di wilayah sekitar, yang pada gilirannya dapat memicu berbagai tantangan sosial, seperti peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Julfizar & Akhyar, 2024). Masyarakat lokal mungkin merasa terancam oleh kedatangan pendatang baru yang dapat mengubah dinamika sosial dan budaya yang telah ada. Selain itu, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan sumber daya lainnya dapat memperburuk ketegangan antar kelompok masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan guna mengelola perubahan ini dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas sosial di komunitas lokal.

B. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dari kedua jalan tol juga sangat mencolok, terutama terkait perubahan pola aliran air dan erosi tanah. Pada pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin menunjukkan bahwa, daerah sekitar mengalami peningkatan kejadian banjir hingga 40% dibandingkan sebelum proyek berjalan. Hal ini terjadi akibat perubahan sistem drainase alami yang tidak diperhitungkan dengan baik. Selain itu, konstruksi jalan tol menyebabkan deforestasi di beberapa titik, menghilangkan lebih dari 150 hektare hutan lindung yang berfungsi sebagai penyerap air alami, sehingga meningkatkan risiko tanah longsor di musim hujan (Susilo & Triputro, 2023). Sementara itu, jalan tol MBZ yang dibangun di atas jalan tol eksisting tanpa perencanaan sistem pembuangan limbah yang memadai, menyebabkan peningkatan suhu permukaan jalan hingga 5°C lebih tinggi dari rata-rata daerah sekitarnya, yang berpotensi mempercepat degradasi material jalan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca akibat penggunaan kendaraan bermotor yang semakin padat.

Dampak lingkungan dari pembangunan jalan tol MBZ dan Padang-Sicincin tidak hanya terbatas pada perubahan pola aliran air dan erosi tanah, tetapi juga mencakup kerusakan ekosistem yang lebih luas. Proyek ini menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang sebelumnya hidup di area tersebut. Deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk jalan tol mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Selain itu, polusi udara yang meningkat akibat emisi kendaraan bermotor di jalan tol berpotensi merusak kualitas udara di sekitar wilayah tersebut, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan polusi udara dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti gangguan pernapasan dan penyakit kardiovaskular (Sofia, 2024).

Lebih jauh lagi, dampak lingkungan dari pembangunan jalan tol juga mencakup perubahan iklim lokal. Dengan meningkatnya suhu permukaan akibat aspal dan beton yang menyerap panas, daerah sekitar jalan tol dapat mengalami perubahan cuaca yang ekstrem, seperti musim panas yang berkepanjangan dan peningkatan frekuensi hujan lebat (Sani et al., 2024). Hal ini berpotensi memperburuk risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Masyarakat setempat akan merasakan dampak langsung dari perubahan ini dalam bentuk ketidakpastian cuaca yang dapat mempengaruhi pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi mitigasi dampak lingkungan yang efektif, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik konservasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar proyek infrastruktur ini.

C. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari proyek ini juga tidak bisa diabaikan, terutama terkait biaya perawatan dan keberlanjutan infrastruktur. Jalan Tol MBZ mengalami penurunan kualitas material akibat korupsi dalam proyeknya, dengan indikasi pengurangan ketebalan beton hingga 20% dari spesifikasi yang seharusnya, yang mengakibatkan biaya perbaikan tahunan meningkat sebesar Rp100 miliar lebih tinggi dari perkiraan awal (Kompas.com, 2025). Selain itu, proyek ini juga memicu ketimpangan ekonomi, di mana sektor informal seperti pedagang kecil mengalami penurunan pendapatan sebesar 25% akibat berkurangnya aksesibilitas ke daerah yang sebelumnya menjadi jalur utama distribusi barang (Insider Indonesia, 2025). Di sisi lain, meskipun tol Padang-Sicincin diharapkan meningkatkan mobilitas ekonomi, justru biaya tol yang tinggi membuat kendaraan logistik skala kecil memilih jalur alternatif yang lebih murah, sehingga kebermanfaatan ekonominya belum optimal bagi pelaku usaha lokal.

Dampak ekonomi dari pembangunan jalan tol juga terlihat dalam peningkatan nilai properti di sekitar area tol. Dengan adanya akses yang lebih baik dan kemudahan transportasi, nilai tanah dan bangunan di sekitar jalan tol cenderung mengalami kenaikan yang signifikan (Aiman, 2024). Hal ini memberikan peluang bagi pemilik lahan untuk menjual atau menyewakan properti mereka dengan harga yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, kenaikan nilai properti ini juga dapat menyebabkan masalah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang mungkin tidak mampu membeli atau menyewa tempat tinggal di daerah tersebut akibat harga yang melambung. Ketidakmampuan untuk bersaing dalam pasar properti dapat mengakibatkan pengusiran dan perpindahan penduduk lokal, yang berdampak pada struktur sosial dan ekonomi komunitas (Maria et al., 2024).

Di sisi lain, meskipun proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, kenyataannya banyak pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan masyarakat lokal. Banyak pekerja dari luar daerah yang dipekerjakan dalam proyek konstruksi dan operasional jalan tol, sehingga masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari peningkatan ekonomi yang terjadi. Selain itu, ketidakpastian terkait keberlanjutan proyek, seperti masalah korupsi dan pengelolaan yang buruk, dapat mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi lebih lanjut di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi yang berkembang akibat proyek infrastruktur ini (Silalahi & Faturahman, 2025).

D. Dampak Terhadap Infrastruktur Jalan Tol

Dampak terhadap kondisi fisik jalan tol akibat korupsi juga menjadi perhatian utama. Pada proyek jalan tol MBZ, ditemukan bahwa beberapa ruas jalan mengalami retakan dini akibat penggunaan material berkualitas rendah. Investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa setidaknya 15% dari total panjang jalan mengalami kerusakan dini, termasuk retakan, amblas, dan lubang yang muncul dalam kurun waktu kurang dari dua tahun setelah diresmikan. Hal ini diperparah dengan sistem drainase yang buruk, menyebabkan genangan air di beberapa titik yang mempercepat kerusakan aspal. Di jalan tol Padang-Sicincin, kasus serupa juga terjadi, di mana dilaporkan beberapa segmen jalan mengalami deformasi akibat penggunaan beton yang tidak memenuhi standar ketahanan beban kendaraan berat. Studi dari Kementerian PUPR (2024) menyebutkan bahwa 12 km dari total jalur tol menunjukkan tingkat penurunan elevasi lebih dari 5 cm, yang berisiko menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Dampak terhadap infrastruktur jalan tol juga mencakup masalah pemeliharaan dan biaya operasional yang meningkat akibat kualitas material yang buruk. Pada proyek jalan tol MBZ, kerusakan dini yang terjadi tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan tetapi juga meningkatkan beban biaya perawatan bagi pemerintah dan pengelola jalan (Mirmaska, 2023). Dengan adanya retakan, amblas, dan lubang yang muncul dalam waktu singkat, diperlukan investasi tambahan untuk perbaikan yang seharusnya tidak diperlukan jika proyek dibangun sesuai standar. Hal ini menyebabkan alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur lainnya terpaksa dialihkan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Selain itu, kondisi jalan yang tidak optimal dapat mempengaruhi keselamatan pengguna dan berpotensi menimbulkan kecelakaan, sehingga menambah beban ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah akibat biaya medis dan kerugian material (Simamora et al., 2023).

Di sisi lain, dampak terhadap infrastruktur juga terlihat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh jalan tol. Masyarakat mengharapkan jalan tol dapat memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam perjalanan, namun dengan adanya kerusakan dan kualitas yang buruk, harapan tersebut tidak terpenuhi. Ketidakpuasan ini dapat mengurangi tingkat penggunaan jalan tol, sehingga pendapatan dari tarif tol berkurang (Shahab & Amiruddin, 2022). Selain itu, jika kondisi infrastruktur terus memburuk tanpa adanya tindakan perbaikan yang tepat, kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek infrastruktur pemerintah akan menurun. Hal ini bisa berimplikasi pada penurunan investasi di sektor infrastruktur di masa depan, karena investor akan ragu untuk berinvestasi di proyek-proyek yang berisiko tinggi akibat korupsi dan pengelolaan yang buruk (Nurhaliza & Maulana, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan tol MBZ dan Padang-Sicincin memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan kondisi fisik jalan. Secara sosial, terjadi konflik akibat pembebasan lahan yang tidak transparan, serta ketidakpuasan masyarakat yang terdampak secara langsung. Dari segi lingkungan, proyek ini menyebabkan peningkatan polusi udara dan kebisingan, serta degradasi ekosistem di sekitar jalur tol. Dampak ekonomi juga terasa dengan meningkatnya biaya transportasi akibat kerusakan jalan yang memperpendek umur infrastruktur tersebut.

Salah satu faktor utama yang memperburuk dampak ini adalah adanya praktik korupsi dalam proses pembangunan, yang menyebabkan penurunan kualitas material jalan serta mempercepat kerusakan infrastruktur. Akibatnya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan yang seharusnya tidak diperlukan jika pembangunan dilakukan dengan standar yang baik sejak awal.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dalam bentuk pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur, peningkatan transparansi dalam pengadaan proyek, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kondisi jalan tol harus dilakukan untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan kualitas tetap terjaga.

Dengan adanya reformasi dalam sistem pengelolaan proyek infrastruktur, diharapkan jalan tol di Indonesia dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk yang signifikan. Pemerintah juga perlu menggandeng akademisi dan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- ariani, vivi, Jumas, D. Y., Utama, W. P., & Wahyudi, W. W. (2023). Indikator Penyebab Praktik Korupsi pada Industri Konstruksi di Sumatera Barat. *Rekayasa Sipil*, 17(1), 15–22. <https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil.2023.017.01.3>
- Aulia, M. D. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK JALAN TOL MBZ. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 12–22.
- Julfizar, J., & Akhyar, A. (2024). Meningkatkan Integritas Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Sebuah Jalan Menuju Pencegahan Korupsi dan Pelanggaran HAM. *Jurnal Ilmiah SP (Stindo Profesional)*, 10(4), 33–42.
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40–59.
- Maria, J., Indrayani, L., Lubis, J., & Hayyumi, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Pembangunan Yang Melakukan Korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 198–212.
- Mirmaska, A. A. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID. SUS-TPK/2022/PN. TJK). *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).
- Nurhaliza, S., & Maulana, A. F. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ATAS TANAH BENGKOK DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN PROYEK JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 28/PID. SUS-TPK/2023/PN. SRG). *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(10).
- Salsabila, F. N., & Ramdhani, M. F. (2024). *Dampak Sistematis Korupsi Terhadap Perekonomian, Sistem Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur di Indonesia : Sebuah Analisis Komprehensif*. 1(6), 210–220.
- Sani, T. P., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2024). Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menyebabkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID. SUS-TPK/2022/PN MDN). *UNES Law Review*, 6(4), 11896–11906.
- Sapitri, R. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Pembangunan Jalan Tol Padang Pelanbaru Ruas Padang-Sicincin*. 3(2), 90–104.
- Shahab, A., & Amiruddin, M. (2022). Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 583–591.
- Silalahi, C. A. P., & Faturahman, G. (2025). PROBLEMATIKA KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN ISLAM. *Islamic Business Management Studies*, 1(1), 1–6.
- Simamora, F., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2023). KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI JALAN YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5).
- Society, K. C., Maria, T., & Injil, D. (2017). KORUPSI: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya. *Pendidikan Agama Katolik*.
- Sofia, D. P. A. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

INFRASTRUKTUR JALAN DI KUTAI TIMUR. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 25(2), 115–126.

Susilo, E., & Triputro, R. W. (2023). Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3586–3600.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Diakses Dari: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.